

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku Literatur

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H., dan Rekan, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Edisi 2*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Andrae, S. J. Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen: Tweede Druk, J. B. Wolter’ Uitgevers-maatshappij N. V, 1951.
- Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary 5th Edition*, Minn West Publishing co, St. Paul, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Handayani, Tri Astuti, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Makarao, Mohammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- _____, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nurdjana, I.G.M., *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Panjaitan, Hulman dan Daniel Suhardiman, *Kemahiran Beracara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- RM, Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sugiharto, R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Uninsula Press, 2012.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.

b) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401)

c) Putusan – putusan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/ PN
Smg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

d) Jurnal Ilmiah

- Fikriyah, Uswatul Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi, Al'Adalah, Vol. 22, No. 2, Oktober, 2019.
- Ketaren, Budi Prakarsa, dkk, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Hal Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pancabudi, Vol. 14, No. 2, Desember, 2021.
- Kumakauw, Visilia, Butje Tampi, Refly Umbas, Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen, Vol. X, No. 13, Desember, 2021.
- Lestari, Amanda Dea dan Bustanuddin, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang Progresif, Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Lotulung, Paulus Effendi, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman, Makalah dalam Seminar "Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman", diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional R.I, Jakarta, 2008.
- Nugraha, Satriya, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Socioscientia, Vol. 8, No. 1, Maret, 2016
- Pelafu, Fiona L, Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen, Vol. 6, No.3, 2017.
- Permana, I Putu Yogi Indra, I Geda Artha, dan I Ketut Sudjana, Putusan Hakim Pidana Yang Melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013.
- Putra, Eldo Pranoto Dan Muhammad Iqbal, Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan

No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel), Rechtsregel, Vol. 3, No.1, Agustus, 2020.

Putra, Danu Surya & Rahnalemken Ginting, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No.2, 2018.

Putra, Yagie Sagita, Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *UBELAJ*, Vol.1, April, 2017.

Sibarani, Sinintha Y., Pengaruh Asas Kebebasan Hakim Terhadap Kewibawaan Putusan Hakim Atas Perkara Korupsi, *Setara*, Vol.1, No.1, 2018.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika*, Vol. 29, No.1, Januari-April, 2014.

Suhariyanto, Budi, Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan Dalam Perkara Korupsi Politik Kajian Putusan Nomor 1885K/Pid.Sus/2015, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 12, No.1, 2019.

Tallesang, Sonda, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April, 2014.

e) **Skripsi dan Laporan Penelitian**

Kusumawati, Erika, Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim Dalam Membebaskan Terdakwa Dari Dakwaan Primair Dan Subsidair Perkara Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Dan Upaya Hukumnya Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 257/Pid.B/2009/PN. Im), Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2013.

Sudharmawatiningsih, Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015.

Yudha, Kharisma, Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.